



مجلة الاقتصاد الإسلامي

AL-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.18>

Vol. 2 No. 1 (2024)

pp. 39-51

Research Article

## Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Rania Ningsih<sup>1</sup>, Bilal Kautsar Setiabudi<sup>2</sup>, Moh Azfahani Zain<sup>3</sup>,  
Nasya Amelia Putri<sup>4</sup>

1. Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; [220721100112@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100112@student.trunojoyo.ac.id)
2. Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; [220721100133@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100133@student.trunojoyo.ac.id)
3. Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; [220721100125@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100125@student.trunojoyo.ac.id)
4. Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; [220721100117@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100117@student.trunojoyo.ac.id)

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 24, 2024

Revised : April 25, 2024

Accepted : May 20, 2024

Available online : June 18, 2024

**How to Cite:** Rania Ningsih, Bilal Kautsar Setiabudi, Moh azfahani zain, & Nasya Amelia Putri. (2024). Analysis of the Influence of Sharia Monetary Policy on Economic Development in Indonesia. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 39-51. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.18>

### Analysis of the Influence of Sharia Monetary Policy on Economic Development in Indonesia

**Abstract.** The Islamic economic system is considered capable of contributing to the global economy, including in Indonesia. This article aims to analyze monetary policy in Indonesia from an Islamic economic perspective. In this research, researchers observe monetary policy instruments, namely open market operations, where in general, monetary targets are aimed at encouraging economic growth and

stabilizing inflation. The methodology used is a literature study approach to three main journals and several national and international journal articles related to sharia monetary. The main finding of this research is that the development of sharia-based monetary policy in Indonesia is considered to have an important role in economic development in Indonesia.

**Keywords:** Monetary, Islamic Economics, Economic Development, Inflation

**Abstrak.** Sistem ekonomi Islam dinilai mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian global, termasuk di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan moneter di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini peneliti mengamati instrumen kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka (open market operation) dimana secara umum, sasaran moneter ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi inflasi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan terhadap tiga jurnal utama dan beberapa artikel jurnal nasional dan internasional yang terkait dengan moneter syariah. Temuan utama dari penelitian ini adalah perkembangan kebijakan moneter berbasis syariah di Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

**Kata kunci:** Moneter, Ekonomi Islam, Perkembangan Ekonomi, Inflasi

## PENDAHULUAN

Stabilitas perekonomian dalam negeri dapat dicapai dengan menjaga kesehatan sektor mata uang. Mengendalikan laju inflasi dan meningkatkan laju pertumbuhan PD<sub>3</sub> merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan kebijakan perekonomian suatu negara. Kebijakan ekonomi merupakan salah satu bentuk kebijakan berbeda yang dapat diambil suatu negara untuk mengendalikan kedua aspek tersebut.<sup>1</sup> Kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah seringkali berfokus pada mempengaruhi percepatan peredaran uang (money Velocity) dalam perekonomian. Percepatan peredaran uang di masyarakat dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga kredit, nilai tukar, serta variabel ekonomi dan keuangan lainnya.<sup>2</sup> Variabel-variabel tersebut digunakan oleh otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia (B), untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Alat yang digunakan BI dalam merumuskan kebijakan moneter adalah Operasi Pasar Terbuka (OPT), Intervensi Rupiah (IR)/FASBI, Instrumen Stabilisasi. Fasilitas Diskon, Giro Minimum Wajib (GWM), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Beberapa penelitian yang mengkaji alat OPI yang digunakan Bi menunjukkan bahwa setiap alat saling terkait satu sama lain. Namun reaksi impulsif pasar uang antar bank khususnya reaksi sektor syariah terhadap instrumen sertifikat Bank Indonesia (SBI) sangat berimbang, sedangkan reaksi impulsif pasar uang antar bank (SBIS) Bank Indonesia memberikan respon negatif dan lebih berimbang walaupun masih terpengaruh. oleh SBI reguler. Hasil lain menunjukkan bahwa SBI, SBIS, Bank Auar Pasar Uang (PUAB) dan Pasar Perbankan Syariah Vang Aniat (PUAS)

---

<sup>1</sup> F.X. Sugiono, Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm. 4-5

<sup>2</sup> Perry Warjoyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm. 2

memberikan respon positif terhadap uang beredar ( $M_2$ ) di masyarakat.<sup>3</sup> Namun alat yang digunakan untuk mengendalikan percepatan peredaran mata uang dalam kebijakan moneter saat ini adalah mata uang IAT. Uang fiat dianggap sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai hakiki dan cenderung mengarah pada sistem riba yang diharamkan dalam Islam, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa instrumen bunga pun yang digunakan juga merupakan riba dan tidak boleh menjadi bagiannya. uang. mengendalikan perekonomian negara, khususnya pada sektor perbankan syariah. Fungsi uang sebagai alat spekulasi dalam teori ekonomi konvensional berbanding terbalik dengan fungsi uang dalam teori ekonomi Islam. Ekonomi Islam hanya memperbolehkan uang sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Akibatnya, mata uang fiat yang tidak tahan terhadap kekacauan ekonomi akan rentan terhadap guncangan. Selain itu, mata uang yang terapresiasi oleh sistem suku bunga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian sehingga membuat tingkat inflasi tidak terkendali.

Namun, mata uang fiat saat ini menjadi satu-satunya tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara pada tingkat makro. Rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada periode 2014-2017 sebesar 4,99%, dengan rincian laju pertumbuhan sebesar 5,01% pada tahun 2014, 4,88% pada tahun 2015, 5,03% pada tahun 2016, dan 5,07% pada tahun 2017.<sup>4</sup> Pada periode yang sama, pertumbuhan Rata-rata laju pertumbuhan laju inflasi riil di Indonesia sebesar 4,58%, rinciannya pada tahun 2014 Indonesia mengalami inflasi sebesar 8,36%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3,35%, pada tahun 2016 menjadi 3,02% dan pada tahun 2017 menjadi 3,61%.<sup>5</sup> Hubungan negatif antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan inflasi sangat penting bagi suatu negara untuk menstabilkan kondisi perekonomian nasionalnya.

Kebijakan ekonomi dan moneter suatu negara berfokus pada bagaimana negara tersebut dapat menciptakan dan menjamin distribusi kemakmuran yang adil kepada masyarakat. Masyarakat dapat sejahtera bila kepentingan konsumen dan kepentingan produsen terpenuhi dengan baik atau bila produksi dan konsumsi seimbang. Kondisi keseimbangan ekonomi terjadi ketika kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari transaksi ekonomi yang dilakukan. Oleh karena itu, beban bunga akibat penggunaan mata uang tradisional sebagai alat penerapan kebijakan moneter perlu dikaji lebih lanjut untuk menemukan sistem yang cocok untuk mencapai keseimbangan perekonomian yang sebenarnya. Dari interpretasi di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi sejalan dengan tingkat kemiskinan, meskipun secara bersama-sama internal/unit yang terlibat dalam kebijakan OPT mempunyai pengaruh yang signifikan. Pada saat yang sama alat

---

<sup>3</sup> Sakinah Rachman dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap  $M_2$  di Indonesia Periode 2009-2016," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* Vol V No.1 2016, hlm. 89- 90

<sup>4</sup> Bank Indonesia, "Bank Indonesia," Bank Indonesia, last modified 2018, diakses 3 Maret , 2019

<sup>5</sup> Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional, *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2014-2018* (Jakarta, 2018), hlm. 77-80

utama yang digunakan negara dalam kebijakan moneter adalah pertukaran uang di pasar mata uang dengan nilai tukar tambahan tertentu. Dengan menggunakan pendekatan teori moneter dan konsep uang dalam perspektif Islam, penulis akan menjawab pertanyaan berikut: bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penggunaan uang dalam operasi pasar terbuka (OPT)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang relevan dan penelitian literatur. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas, artikel ini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Pembahasannya antara lain perkembangan kebijakan moneter dan OPT Indonesia, kemudian sejarah dan konsep uang dalam perspektif Islam, dan di akhir artikel ini akan dianalisis keterkaitan antara OPT dan mata uang Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian deskriptif analitis kualitatif. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penggunaan metode ini digunakan untuk menganalisis dokumen terkait kebijakan moneter khususnya instrumen operasi pasar terbuka (OPT). Selain itu, membaca literatur terkait seperti teori uang yang diteliti melalui ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam juga menggunakan metode ini. Setelah membaca dokumen dan teks terkait topik pembahasan untuk mendapatkan gambaran dan jawaban yang utuh, artikel ini menyajikan dialog teoritis tentang bagaimana penggunaan mata uang fiat dalam kebijakan moneter suatu negara.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Ekonomi Negara**

Terdapat perbedaan mendasar antara kedua paradigma dalam penelitian makroekonomi setelah kematian Keynes. Yang pertama, aliran dominan atau neoklasik, didasarkan pada hipotesis makro ekonomi yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi diarahkan oleh agen individu; fungsi produksi yang menciptakan pasar bersih, sehingga perekonomian berada pada lapangan kerja penuh. Kedua adalah post-Keynesian atau strukturalisme, yang berasumsi bahwa institusi dan data ekonomi dan pemerintahan dapat diuji secara empiris.<sup>6</sup> Aliran pemikiran ekonomi tradisional terus berkembang dalam kondisi perekonomian yang semakin kompleks, terbuka dan pesat serta hubungan antar negara di seluruh dunia yang tidak bisa dihindari.

Perbedaan antara kedua perspektif ini mempunyai implikasi terhadap kebijakan ekonomi yang perlu dikembangkan suatu negara. Perbedaan signifikan antara teori klasik dan teori modern terletak pada prioritas kebijakan ekonomi yang ditempuh. Aliran klasik cenderung mengikuti jalur kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas perekonomian, sedangkan aliran ekonomi modern cenderung

---

<sup>6</sup> Wynne Godley dan Marc Lavoie, *Monetary Economics: an Integrated to Credit, Money, Income, Production and Wealth* (Great Britain: Antony Rowe Ltd, Chippenham and Eastbourne, 2007), hlm. 1-2

memilih kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan perekonomian. Namun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni menciptakan keseimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan negara. Selain itu, jika suatu negara memilih jalur kebijakan moneter, peran dominan berada di tangan Bank Sentral sebagai pusat kebijakan, sedangkan jalur fiskal atau pajak berada di tangan Kementerian Keuangan.

### **Kebijakan Moneter Indonesia**

Aktivitas ekonomi dan keuangan suatu negara dipengaruhi oleh peran kebijakan moneter bank sentral. Sebab, kebijakan ini bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk stabilitas harga dan peredaran uang dalam perekonomian. Perkembangan peredaran uang, suku bunga; nilai tukar, dll. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia (BI) adalah mencapai dan memelihara nilai Rupiah, stabilitas harga (inflasi), dan stabilitas nilai tukar Rupiah.<sup>7</sup>

Pada tataran praktis setidaknya kebijakan moneter dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

1. perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi
2. rentang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran inflasi (lag)
3. perubahan alur transmisi moneter yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan negara.

Oleh karena itu, untuk menyikapi perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan, perlu dilakukan antisipasi terhadap perubahan perilaku tersebut. Lamanya waktu yang dibutuhkan tergantung pada kompleksitas instrumen keuangan yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Perubahan arus yang digunakan dalam perekonomian terbuka menyebabkan kondisi moneter dan fiskal suatu negara saling berinteraksi.

Kompleksitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia dapat dijelaskan setidaknya dalam dua tahap. Yaitu pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam aktivitas keuangan. Kedua, adanya interaksi terkait fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara lembaga keuangan seperti bank dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi di sektor riil. Saluran yang mendasari kebijakan moneter meliputi uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.

### **Operasi Pasar Terbuka**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan moneter merupakan salah satu dari kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Dalam kebijakan moneter, kesejahteraan dapat diidentifikasi melalui pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keseimbangan harga, dan neraca pembayaran yang tercermin dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter ini, bank

---

<sup>7</sup> Warjoyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm.2

sentral mempertimbangkan dua tujuan akhir. Biasanya ditujukan untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perkembangan perekonomian suatu negara dari tertutup menjadi terbuka mengharuskan negara-negara meninggalkan alat kebijakan langsung dan beralih menggunakan alat kebijakan moneter tidak langsung. Di Indonesia, perangkat kebijakan langsung mulai dianggap tidak efektif pada awal tahun 1980an, sebelum beralih ke kebijakan moneter tidak langsung. Salah satu kebijakan moneter tidak langsung yang digunakan adalah Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang ditandai dengan diberlakukannya kebijakan deregulasi keuangan dan perbankan pada tahun 1983. Secara umum OPT diartikan sebagai pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral, pasar perdana dan pasar sekunder yang bertujuan untuk mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang, seperti surat berharga pemerintah (treasury bill atau treasury bill), surat berharga bank sentral (central bank note) dan surat berharga swasta (basic Commercial Papers). Operasi pasar terbuka merupakan alat kebijakan yang sering digunakan oleh otoritas moneter, karena alat ini berorientasi pada pasar, partisipasi bank dan broker tidak mengikat atau ditentukan sebelumnya. Arah kebijakan mudah ditangkap oleh pasar dan tidak membebani pasar keuangan bank.

Selanjutnya, untuk mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang, kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dapat berupa kebijakan kontraktif atau ekspansif. Dalam kondisi kontraksi, BI menjual SBI dan untuk ekspansi BI membeli SBI (SBI Repo). Dengan kata lain, jika terdapat kelebihan likuiditas bank maka BI akan menjual surat berharga, sebaliknya jika terdapat kelebihan permintaan uang maka BI akan membeli surat berharga tersebut. Implikasi dari jual beli surat berharga adalah beban yang timbul. Jika BI menjual SBI maka beban OPT ditanggung BI, sedangkan jika OPT menggunakan intervensi valas, tergantung regulator, BI atau pemerintah.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mencapai puncaknya pada tahun 2007 sebesar Rp 245,328 miliar, sedangkan sertifikat syariah Bank Indonesia Indonesia (SBIS) mencapai angka tertinggi pada tahun 2009, sebesar 4,341 miliar rupiah. Sedangkan FASBIS mengalami peningkatan terbesar yaitu mencapai 460% dalam kurun waktu empat tahun, dari Rs 3,386 miliar pada tahun 2009 menjadi Rs 15,582 miliar pada tahun 2012. Selama ini, fluktuasi dan pertumbuhan yang eksponensial dari setiap alat yang diterapkan BI menunjukkan adanya upaya untuk mempersempit dan memperluas. untuk mengatur jumlah uang yang beredar.

### **Mekanisme Operasi Pasar Terbuka (OPT)**

Selain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam mata uang rupee, Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana atau pasar sekunder (OPT) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dapat berupa jual beli mata uang. terhadap rupee dan Fasilitas Tabungan Bank Sentral (FASBI/Rupiah Intervention (IR)). SBI dapat diartikan sebagai surat penegasan utang jangka pendek dalam nominal rupee dengan sistem diskonto melalui sistem lelang atau nonlelang.

Surat berharga yang diperdagangkan oleh BI harus mempunyai likuiditas, syaratnya adalah:

1. diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga wajar;

2. volume surat berharga mencukupi untuk keperluan OPT dan;
3. diterbitkan terus menerus dan tersedia setiap saat.

Selain SBI, BI juga menawarkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai fasilitas simpanan bagi bank syariah yang menggunakan prinsip syariah. Lalu ada FASBI, alat ini digunakan BI untuk melakukan kontrak dan ekspansi melalui mekanisme peminjaman antar bank (PUAB). ) dengan durasi lebih pendek dibandingkan SBI.

Dalam pelaksanaan OPT, BI menetapkan mata uang dasar atau komponennya sebagai sasaran operasional dan jumlah uang logam yang beredar dalam arti sempit dan luas ( $M_1$ ,  $M_2$ ). Lelang SBI merupakan penjualan pasar perdana kepada peserta lelang yang ditunjuk BI yaitu bank, pedagang pasar uang, dan pedagang pasar modal. Sementara itu, jumlah SBI yang diterbitkan BI disesuaikan dengan target lelang berdasarkan jumlah dan status likuiditas bank, yang disebut stop rasio (SOR). Selanjutnya, Dewan Gubernur Bank Indonesia (DGBI) mengadakan rapat mingguan Dewan Gubernur (RDB) untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan mengidentifikasi kebijakan lain yang bersifat fundamental dan strategis.

Lebih lanjut, besar kecilnya target lelang bergantung pada kondisi likuiditas bank dan dipengaruhi oleh:

1. perubahan faktor otonomi;
2. posisi jatuh tempo instrumen OPT dan;
3. desinfeksi/intervensi devisa.

Selanjutnya, penentuan pemenang lelang Sistem Penyelesaian Keamanan Tanpa Teks Bank Indonesia (BI-SSSS) akan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Apabila penawaran yang diajukan memiliki tingkat diskonto lebih rendah dari SOR yang ditentukan, maka peserta lelang yang bersangkutan akan menerima seluruh SBI yang diberikan
2. tingkat diskonto yang dikirimkan untuk penawaran sama dengan SOR yang ditentukan, maka penawar yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh jumlah yang dikirimkan oleh SBI dan
3. Kuantitas hasil lelang SBI dapat disesuaikan dengan target kuantitas atau dibatalkan sama sekali dalam hal SOR yang terbentuk dari penawaran lelang berada di luar batas kewajaran.

## Sejarah Uang

Pada masa awal peradaban, ketika manusia diasumsikan tidak memiliki kelebihan barang, maka transaksi yang digunakan menggunakan sistem barter. Dalam istilah ekonomi, barter adalah suatu kondisi dimana masyarakat menukarkan suatu barang dengan barang lainnya secara langsung. Kemudian ketika beberapa entitas ekonomi dan sosial mencapai tingkat kemakmuran, masyarakat sepakat untuk mendefinisikan alat tukar sebagai alat transaksi. Dengan berkembangnya transaksi sosial ekonomi masyarakat dan perjanjian terkait uang komoditas yang bersifat lokal dan berbeda-beda antar masyarakat, maka permasalahan pelaksanaan transaksi timbul dari luar masyarakat. Oleh karena itu, konsensus para pelaku

ekonomi saat itu adalah mengidentifikasi alat tukar yang dapat digunakan secara lebih luas.

Meskipun uang komoditas banyak digunakan di masyarakat, emas dan perak dalam bentuk koin lebih banyak digunakan karena daya tahan dan keandalannya. Koin pertama yang terbuat dari logam mulia yang digunakan sebagai mata uang tak bertanda muncul di Tiongkok sekitar tahun 1000 SM dan sekitar tahun 700 SM di Yunani. Belakangan, koin emas dan perak diberi tanda di kedua sisinya, misalnya koin bergambar Athena di depan dan belakang yang dikeluarkan oleh Alexander Agung. Penggunaan uang emas dan perak bertahan hingga pertengahan abad ke-20, namun kini digantikan oleh berbagai bentuk uang.

Semakin berkembangnya transaksi ekonomi mengakhiri fase uang logam dan digantikan oleh uang kertas. Kemunculan uang kertas pertama kali terjadi di Tiongkok sekitar tahun 1000 dan di Eropa sekitar tahun 1500-1700. Pada awalnya, uang kertas didukung oleh ketersediaan emas dan perak. Oleh karena itu, penggunaan uang kertas dimaksudkan untuk memudahkan transaksi dan memudahkan pengangkutannya ke berbagai tempat. Misalnya, pada awal abad ke-20, Amerika Serikat memiliki uang kertas berupa sertifikat emas yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas dan perak. Untuk memperoleh sertifikat emas dan perak, seseorang harus menukarkan emas yang dimilikinya, yang kemudian diganti dengan sertifikat kepemilikan emas dan perak tersebut. Untuk memfasilitasi transaksi penjualan, sertifikat yang dipegang oleh pemegangnya dinyatakan dalam koin emas, yang dibayarkan kepada pembeli sesuai permintaan dalam sertifikat emas (Federal Reserve AS, 1922) dan dolar perak, ini menyatakan bahwa ada telah disimpan di Departemen Keuangan (Federal Reserve AS, 1908).

Kemudian uang kertas yang awalnya berbasis emas dalam artian diterbitkan berdasarkan cadangan emas yang dimiliki, menjadi semakin liar. Selain itu, pemerintah atau bank menyadari bahwa permintaan meningkat seiring berjalannya waktu dan masyarakat lebih memilih untuk mengurangi penggunaan uang kertas. permintaan yang sering. Setelah itu, uang kertas yang asli berbahan emas, dalam artian diterbitkan berdasarkan cadangan emas yang dimiliki, menjadi semakin liar. Selanjutnya, pemerintah atau bank menerima ternyata permintaannya semakin meningkat. lama kelamaan dan masyarakat lebih memilih menggunakan uang kertas, jarang bertanya

## Fungsi Uang

Dalam perspektif perekonomian konvensional, uang merupakan salah satu jenis aset yang berfungsi sebagai alat tukar dalam perekonomian, yang mana alat tukar tersebut digunakan oleh entitas ekonomi untuk membeli barang dan jasa.<sup>8</sup> Selain itu uang juga berfungsi sebagai satuan hitung dan alat pencipta nilai. Namun dalam proses perkembangannya, fungsi ini berkembang dengan asumsi bahwa nilai uang akan menurun sesuai dengan tingkat ke depan nilai waktu uang, sehingga menyulitkan penawaran dan permintaan uang mencapai keseimbangan dan menurunkan standar sebagai 'alat ukur'. Selain itu, fungsi Fungsi uang adalah adanya

---

<sup>8</sup> Ball, Money, Banking, and..., hlm. 27



dua jenis uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari, yaitu uang komoditas dan uang fiat. Uang pasar merupakan suatu benda yang nilainya disepakati sebagai alat tukar, sedangkan uang fiat adalah uang yang tidak memiliki nilai hakiki.

Uang komoditi yang berasal dari barang-barang bersama yang disepakati kedua belah pihak sebagai alat tukar dalam bertransaksi, kemudian berbahan dasar emas dan perak, sebagaimana disebutkan di atas. Hingga pertengahan abad ke-20, uang komoditas ditinggalkan dan digantikan oleh uang jenis lain, yaitu uang fiat. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar negara di dunia sekarang menggunakan mata uang ini. Disebut uang fiat karena keberadaannya sebagai alat pembayaran. Mata uang ditentukan oleh pemerintah dan dikenakan biaya untuk mencetak mata uang fiat yang tidak sama dengan denominasi yang disebutkan. Dengan kata lain, jika pemerintah menghilangkan fungsi uang kertas, maka uang tersebut tidak lagi memiliki nilai dan harga.

Seperti halnya fungsi uang di atas, transmisi uang melalui operasi pasar terbuka (OPT) sepenuhnya mendukung fungsi uang. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), misalnya SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) adalah surat berharga yang dinilai pada nilai nominal tertentu dan diperdagangkan pada tingkat diskonto atau tingkat bunga tertentu untuk menarik minat lembaga perbankan dan pialang yang terlibat dalam penjualan atau pembelian SBI yang diterbitkan. Hal ini juga berlaku pada instrumen OPT lainnya seperti SUN, SWBI, SBIS, FASBI, Intervensi Rupiah dan lain-lain. Oleh karena itu, mengacu pada pengertian mata uang fiat di atas, jika mata uang tersebut dicabut oleh pemerintah atau tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, maka sistem moneter negara tersebut dapat mengalami krisis dan berdampak sistemik.

### Uang Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, uang merupakan aset publik, dalam arti harus beredar dan tidak boleh dibiarkan (tidak terpakai) dalam keadaan tidak menguntungkan, karena akan menghambat peredaran arus perekonomian. Lebih lanjut, Islam memandang uang sebagai konsep aliran dan kapital sebagai konsep stok, sedangkan ilmu ekonomi konvensional memandang uang memiliki dua aspek yang simultan, yakni uang dan kapital sekaligus. Dari sudut pandang ekonomi, suatu mata uang tidak mempunyai kedua fungsi tersebut secara bersamaan, misalnya mata uang yang terstandarisasi berdasarkan emas atau perak.

Dua mata uang yang menjadi alat tukar pada masa awal pemerintahan Islam pertama kali berasal dari Kerajaan Romawi yaitu emas dan perak dari Kerajaan Persia dengan nilai tukar dinar ke dirham 1 :10, kemudian beralih ke 1 :35. Menurut sebagian ekonom muslim, relevansi dinar dan dirham secara fungsional mirip dengan uang kertas yang ada saat ini, karena pengumpulan zakatnya dilakukan dalam uang kertas. Selain itu, uang diciptakan untuk mendorong kelancaran arus perdagangan dan menciptakan nilai wajar dari pertukaran.

Berdasarkan QS. Al-Anam: 152, uang ibarat timbangan nilai suatu benda yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai, ia harus memainkan perannya secara adil dalam perekonomian dalam pembayaran, terutama dalam pembayaran yang ditangguhkan (*welcome deals*), karena arus upaya. Tidak ada jaminan akan hal ini di

kemudian hari (QS. Lukman: 34). Dalam konteks ini, alat yang digunakan dalam kebijakan moneter di Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Intervensi Rupiah (IR), Nilai Tukar, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), obligasi pemerintah, dan obligasi swasta semuanya menggunakan instrumen moneter. Penggunaan uang sebagai alat utama dalam transmisi kebijakan OPT yang dilaksanakan oleh BI menciptakan peluang spekulatif bagi lembaga perbankan dan broker dengan memprediksi kemungkinan harga di masa depan dengan menggunakan sistem lelang pra pasar. Dengan cara ini, nilai resistensi emas sebagai aset dasar mata uang yang diterbitkan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi dibandingkan mata uang tradisional.

Memang sistem perekonomian terbuka yang diterapkan sebagian besar negara di dunia saat ini menerima dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang acuan dalam transaksi perdagangan internasional. Dolar AS digunakan sebagai alat ukur hubungan antar negara dalam melakukan impor, ekspor, investasi, dan piutang. Dominasi dolar AS dalam perekonomian global saat ini semakin sulit dijadikan satu-satunya acuan dalam transaksi ekonomi antar negara, seiring dengan fluktuasi harga dolar yang semakin ganas dan sulit dikendalikan. Hal ini menyiratkan inflasi yang sangat tinggi di negara-negara yang perdagangan globalnya bergantung pada dolar. Misalnya, bencana keuangan yang menimpa teman-teman kita di Asia karena keajaiban Asia telah menjadi krisis Asia.

### **Peluang Ekonomi Islam**

Ketidakstabilan perekonomian cenderung berdampak buruk pada kesehatan perekonomian suatu negara. Apalagi dengan mekanisme yang ada saat ini, Dolar Amerika (USD) menjadi salah satu mata uang yang dominan dan diterima oleh seluruh negara di dunia. Seperti disebutkan sebelumnya, uang kertas internasional kini digunakan sebagai acuan perdagangan luar negeri, impor dan ekspor, investasi dan utang. Sejarah mencatat, setidaknya telah terjadi 20 kali krisis ekonomi yang berdampak pada perekonomian negara-negara di dunia. Memang Negara-negara Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lain dalam hal warisan, sumber daya abadi, tahap perkembangan dan sistem politik. Tahap ini semua berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah tidak bertujuan hanya pada pembangunan tetapi juga pada perubahan sosial yang transformasional dengan segala konsekuensinya.

### **Kebijakan Moneter Islam**

Inflasi merupakan gejala ketidakseimbangan dan hal ini tidak sejalan dengan konsep keseimbangan yang dikemukakan oleh ekonomi Islam.<sup>9</sup> Jadi, menghidupkan kembali permasalahan perekonomian berarti menyerang akar permasalahannya, khususnya dengan mengubah konsep transmisi kebijakan moneter. Perubahan tersebut didasari oleh konsep inflasi yang tidak adil terhadap pinjaman non-riba (debitur) dan menggerus nilai riil, karena konsep qardhul hasan dapat diterapkan

---

<sup>9</sup> Sugiono, Instrumen Pengendalian..., hlm. 32

secara lebih adil pada pinjaman. Memang konsep qardhul hasan merupakan instrumen keuangan yang dapat diperluas dan memanfaatkan mekanisme bagi hasil. Faktanya, sebagian besar produk yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) dilakukan dengan sistem diskonto. Padahal saat menerbitkan surat berharga, BI menggunakan diskon murni dan membebaskan biaya diskon di muka.

Untuk mengatasi permasalahan sebelumnya, Chapra mengajukan sejumlah alternatif sebagai landasan kebijakan ekonomi syariah. Alternatif-alternatif tersebut dianggap cukup dan tidak berlebihan bagi suatu negara jika dikaji lebih dekat. Alternatif-alternatif tersebut antara lain: pertama, defisit anggaran, eksploitasi sumber daya yang cepat dibandingkan stabilitas harga yang berkelanjutan cenderung meningkatkan defisit anggaran dan dengan demikian mempercepat jumlah uang beredar. menyebabkan peningkatan inflasi. Kedua, menciptakan pinjaman bank umum, simpanan primer yang mendasari sistem perbankan, dan simpanan derivatif, jumlah ini sebanding dengan cadangan, mencerminkan uang bank dalam proses pengembangan kredit pembangunan, dan sekaligus merupakan sumber uang utama. pendanaan. ekonomi. Ketiga, surplus neraca pembayaran. Saat ini, hanya segelintir negara Muslim yang menikmati surplus neraca pembayaran.

Kebijakan ekonomi moneter dalam perspektif Islam setidaknya menyimpang dari penilaian sistem konvensional yang pada kenyataannya tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Ketimpangan dalam sistem kapitalisme memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin (economic gap). Mengabaikan hak-hak individu merupakan hambatan besar bagi sistem sosialis. Oleh karena itu, dalam kajian makroekonomi dari perspektif ekonomi Islam, selain memberikan alternatif konsep dalam penerapan kebijakan moneter, ekonomi Islam juga tetap menggunakan kebijakan pass-through yang mengikuti kedua sistem konvensional asalkan sesuai dan konsisten dengan tujuan manusia.

## KESIMPULAN

Operasi Pasar Terbuka (OPT) merupakan salah satu instrument kebijakan moneter yang paling sering digunakan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka treatment stabilitas perekonomian negara. Strategi yang digunakan dalam OPT dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi Pemerintah, Obligasi Swasta, Intervensi Rupiah (IR), dan Fasilitas Pinjaman Bank Indonesia (FASBI) yang diperjual belikan di pasar uang.

Penerbitan surat berharga tersebut sebagian besar menggunakan sistem diskonto. Sistem tersebut dimanfaatkan sebagai upaya meng-kontraksi dan ekspansi kebijakan ekonomi dan keuangan. Basis yang digunakan dalam sistem diskonto adalah uang fiat dan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar tidak sepenuhnya dapat memberikan implikasi berarti dalam pengendalian inflasi itu sendiri. Ketika tujuan kebijakan moneter adalah kontraksi ekonomi, maka kebijakan moneter dirumuskan untuk menarik jumlah orang yang beredar, akan tetapi disaat yang bersamaan kebijakan tersebut menetapkan tingkat suku bunga lebih rendah atas surat berharga yang diterbitkan.

Kemudian, ketika jatuh tempo surat berharga tersebut dijual kembali dan memberikan dampak penambahan uang yang beredar secara tidak langsung. Oleh karena itu, basis bunga yang digunakan harus disubstitusi dengan menggunakan konsep dan prinsip syariah yang under-lying penciptaan uang adalah produktivitas. Sebagaimana diusulkan juga oleh Chapra bahwa komunikasi antara pemerintah dan bank sentral menjadi fundamental untuk menjaga stabilitas inflasi. Limitasi artikel ini belum membahas tentang bagaimana implikasi empiris instrument yang digunakan oleh otoritas dalam menerapkan kebijakan moneter berbasis produktivitas. Oleh karena itu Dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya dapat membahas dampak empiris dari penerapan instrument syariah dalam kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Romdhoni, & Sofi Anaba Fauziah. (2023). The Position of Science From The Islamic Perspective (Analysis of Surat al-Taubah Verse 122). *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(1), 14–18. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v1i1.3>
- Arifin, Z., Prayitno, M. A., & Sudarmanto, E. (2023). Comparative Analysis of Muhammad Umer Chapra and John Maynard Keynes' Perspectives on Fiscal Stimulus in Addressing Economic Crises. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(3), 135–145. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i3.55>
- Bank Indonesia, "Bank Indonesia," Bank Indonesia, last modified 2018, diakses 3 Maret , 2019
- F.X. Sugiono, Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm. 4-5
- Khairul Wahid, & Yuliani. (2023). Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 44–55. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.10>
- Mugni Muhit, Yadi Januari and Sofyan Al-Hakim (2024) "Dynamics of Monetary Policy Comparative Study Between Indonesia and Malaysia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 606–619. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1043
- Muhamad Wildan. (2024). The Important Role of Aqşam in the Development of Islamic Economics. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.1>
- Perry Warjoyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm. 2
- Sakinah Rachman dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap M2 di Indonesia Periode 2009- 2016," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* Vol V No. 1 2016, hlm. 89- 90

- Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional, Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2014-2018 (Jakarta, 2018), hlm. 77-80
- Sugiono, Instrumen Pengendalian ..., hlm. 32
- Warjoyo, Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm. 2
- Wynne Godley dan Marc Lavoie, Monetary Economics: an Integrated to Credit, Money, Income, Production and Wealth (Great Britain: Antony Rowe Ltd, Chippenham and Eastbourne, 2007), hlm. 1-2
- Zhilwan Tahir, & Abdulwahed Jalal Nuri. (2024). Examining the Impact of Religion on Civilization: Insights from Ibn Khaldun and Arnold Toynbee's Theories. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, 2(2), 106–123. <https://doi.org/10.58355/dirosat.v2i2.69>